



PERAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM: TELAAH KOMPARATIF ANTARA KAPITALISME DAN SOSIALISME

Saeed Fayzul Hayat

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: fayzulhayats@gmail.com

Idris Parakkasi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id

Muslimin Kara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id

Fatimah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: fatimah.fdk@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the role of the state in Islamic economics through a comparative study of the economic systems of capitalism and socialism. Capitalism emphasizes market freedom with minimal state intervention, while socialism positions the state as the primary controller of economic activity. These differences give rise to various problems, such as the unequal distribution of wealth in capitalism and state dominance in socialism. This research uses a qualitative approach with library research and a normative-conceptual approach. Data were obtained from various scientific literature in the form of journals, books, and academic documents relevant to the research focus. Data analysis was conducted through content analysis and comparative analysis to compare the position of the state in capitalism, socialism, and Islamic economics. The results show that Islamic economics positions the state as a strategic institution that maintains a balance between market freedom and social justice through proportional intervention. This intervention is realized through market supervision, monopoly control, zakat management, wealth distribution, and protection of vulnerable groups based on the principles of justice, welfare, and social balance. This research confirms the concept of proportional intervention as a distinctive characteristic of Islamic economics and strengthens the study of the relationship between the state and the market in the modern economic system. Thus, Islamic economics offers an economic paradigm that balances market efficiency, social responsibility, and distributive justice proportionally in the relationship between the state, the market, and society.

Keywords: *Role of the state, Islamic economics, capitalism, socialism, proportional intervention*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam ekonomi Islam melalui telaah komparatif dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme menekankan kebebasan pasar dengan intervensi negara yang minimal, sedangkan sosialisme menempatkan negara sebagai pengendali utama aktivitas ekonomi. Perbedaan tersebut melahirkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dalam kapitalisme dan dominasi negara dalam sosialisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan normatif-konseptual. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan dokumen akademik yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* dan *comparative analysis* untuk membandingkan posisi negara dalam kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan negara sebagai institusi strategis yang menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan keadilan sosial melalui intervensi yang proporsional. Intervensi tersebut diwujudkan melalui pengawasan pasar, pengendalian monopoli, pengelolaan zakat, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Penelitian ini menegaskan konsep intervensi proporsional sebagai karakteristik khas ekonomi Islam sekaligus memperkuat kajian mengenai hubungan negara dan pasar dalam sistem ekonomi modern. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan paradigma ekonomi yang menyeimbangkan efisiensi pasar, tanggung jawab sosial, dan keadilan distributif secara proporsional dalam hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat.

Kata Kunci: Peran negara, ekonomi Islam, kapitalisme, sosialisme, intervensi proporsional.

A. Pendahuluan

Perdebatan mengenai hubungan antara negara dan pasar dalam sistem ekonomi terus menjadi isu sentral dalam perkembangan pemikiran ekonomi modern (Aulia 2024). Persoalan mengenai sejauh mana negara harus melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi masih menjadi diskursus penting dalam ekonomi politik kontemporer, terutama ketika berbagai negara menghadapi persoalan ketimpangan distribusi kekayaan, kemiskinan struktural, dan instabilitas ekonomi global (Juhariyah 2025). Dinamika ekonomi global yang ditandai oleh ketimpangan distribusi kekayaan, meningkatnya kemiskinan struktural, monopoli pasar, krisis keuangan, serta ketidakstabilan ekonomi menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern masih menghadapi persoalan mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata.

Krisis finansial global tahun 2008 menjadi salah satu bukti bahwa mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa pengawasan negara yang memadai dapat melahirkan spekulasi ekonomi, konsentrasi modal, dan ketimpangan sosial yang semakin luas (El Hasanah, Dassucik, and Farida 2025). Selain itu, berbagai laporan *Oxfam* menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan global terus meningkat. Dalam laporan *Survival of the Richest*, *Oxfam* mengungkapkan bahwa kekayaan kelompok miliarder bertambah secara signifikan, sementara jutaan masyarakat di berbagai negara masih menghadapi kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar (Indonesia 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan global cenderung terkonsentrasi pada kelompok kecil pemilik modal sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, dominasi negara yang terlalu besar dalam aktivitas ekonomi juga berpotensi menimbulkan birokratisasi, lemahnya inovasi, serta terbatasnya kebebasan ekonomi masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi modern, kapitalisme dan sosialisme merupakan dua sistem ekonomi besar yang memiliki pandangan berbeda mengenai posisi negara dalam aktivitas ekonomi. Kapitalisme menempatkan mekanisme pasar sebagai instrumen utama dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi (Juliyanto et al. 2024). Sistem ini bertumpu pada prinsip kebebasan individu, kepemilikan privat, dan persaingan pasar. Pemikiran kapitalisme klasik yang dipelopori oleh Adam Smith melalui konsep *laissez-faire* menekankan bahwa negara seharusnya memiliki intervensi yang minimal dalam aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Adam Smith, negara pada dasarnya hanya memiliki tiga fungsi utama, yaitu menjaga keamanan negara, menegakkan keadilan, dan menyediakan fasilitas publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta (Nissa et al. 2024). Sistem ekonomi kapitalisme dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi produksi. Akan tetapi, orientasi yang terlalu besar terhadap akumulasi modal dan keuntungan sering kali melahirkan ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi ekonomi, monopoli pasar, dan marginalisasi kelompok ekonomi lemah.

Berbeda dengan kapitalisme, sosialisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengendalian ekonomi. Sistem ini muncul sebagai kritik terhadap kapitalisme yang dianggap menciptakan ketidakadilan sosial akibat dominasi pemilik modal terhadap sumber-sumber produksi (Sulaiman and Putri 2026). Sosialisme menekankan kepemilikan kolektif, pemerataan ekonomi, dan pengendalian negara terhadap aktivitas produksi dan distribusi (Narjono 2025). Negara memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bersama. Meskipun sistem ini berupaya mengurangi kesenjangan sosial, dominasi negara yang terlalu besar dalam aktivitas ekonomi sering kali menimbulkan birokratisasi, lemahnya efisiensi pasar, terbatasnya kebebasan individu, dan rendahnya daya inovasi ekonomi masyarakat.

Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan sosialisme menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut memiliki orientasi yang berbeda dalam memandang hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Kapitalisme cenderung memberikan kebebasan yang luas kepada mekanisme pasar, sedangkan sosialisme menempatkan negara sebagai pengendali utama aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan terhadap suatu sistem ekonomi yang tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Kegagalan kapitalisme dan sosialisme dalam membangun harmoni antara kebebasan ekonomi dan kesejahteraan sosial mendorong lahirnya kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang lebih menekankan prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Ekonomi Islam hadir sebagai sistem ekonomi yang menawarkan pendekatan berbeda terhadap hubungan antara negara dan pasar (Dewi, Sevilia, and Kotimah 2026). Sistem ekonomi Islam tidak menempatkan negara sebagai pihak yang pasif sebagaimana dalam kapitalisme, dan juga tidak menjadikan negara sebagai pengendali absolut sebagaimana dalam sosialisme. Ekonomi Islam memandang bahwa negara memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial melalui intervensi yang proporsional

(Royani, Janwari, and Ridwan 2023). Dalam berbagai literatur ekonomi Islam, posisi ini sering dipahami sebagai jalan tengah (*middle path*) antara kebebasan pasar kapitalisme dan dominasi negara dalam sosialisme.

Konsep peran negara dalam ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab sosial. Selain itu, konsep *maqashid* syariah juga menjadi fondasi penting dalam menjelaskan tujuan negara dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Dalam pandangan M. Umer Chapra, negara dalam ekonomi Islam memiliki tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas ekonomi, distribusi kesejahteraan, serta perlindungan terhadap kepentingan sosial masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan (Febriyanti and Sapa 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan Masyarakat (Rusmiyati et al. 2025). Instrumen-instrumen seperti zakat, *hisbah*, larangan *riba*, pengawasan pasar, distribusi kekayaan, dan jaminan sosial menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan negara sebagai institusi yang aktif dalam menjaga keadilan ekonomi tanpa menghilangkan hak kepemilikan individu dan mekanisme pasar.

Kajian mengenai sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan Islam telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Penelitian Maryam Batubara dan Febriyani Natari Manik dalam artikel berjudul “Peran Pemerintah Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan negara sebagai pengawas pasar yang bertujuan menciptakan distribusi ekonomi yang adil melalui mekanisme *hisbah*, zakat, dan pengawasan aktivitas ekonomi (Batubara and Manik 2023). Penelitian tersebut juga menjelaskan perbedaan peran negara dalam kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam, namun pembahasannya masih bersifat umum dan belum menempatkan keseimbangan antara pasar dan negara sebagai fokus utama analisis.

Penelitian lain yang dilakukan oleh M. Indra Gunawan dalam artikel “Sistem Ekonomi Islam Sebagai Solusi Kapitalisme dan Sosialisme” menjelaskan bahwa kapitalisme cenderung menempatkan negara secara minimal dalam aktivitas ekonomi, sedangkan sosialisme menempatkan negara sebagai pengendali utama ekonomi (Gunawan 2020). Dalam penelitian tersebut, ekonomi Islam dipandang sebagai alternatif atas kelemahan kedua sistem ekonomi tersebut melalui konsep keadilan distributif dan jaminan sosial. Akan tetapi, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada pemetaan konseptual sistem ekonomi dan belum mengkaji secara mendalam mekanisme intervensi negara dalam ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian Kevin Akbar Khoiry, Muhammad Andra Satria Hafiz, dan Nur Rahmad Ariansyah dalam artikel “Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan” menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki orientasi pada keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, serta distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah (Khoiry, Satria Hafiz, and Ariansyah 2023). Penelitian tersebut menempatkan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang mengintegrasikan aspek moral dan material dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, penelitian tersebut masih dominan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif dan belum secara spesifik membahas posisi negara dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan keadilan sosial.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai sistem ekonomi Islam telah berkembang cukup luas, terutama terkait prinsip-prinsip keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan kritik terhadap kapitalisme maupun sosialisme. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih cenderung membahas sistem ekonomi secara umum dan normatif. Kajian yang secara khusus menempatkan peran negara dalam ekonomi Islam sebagai fokus utama analisis melalui pendekatan komparatif dengan kapitalisme dan sosialisme masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menjelaskan secara mendalam bagaimana ekonomi Islam membangun keseimbangan antara

kebebasan pasar dan intervensi negara dalam menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis mengenai posisi negara dalam ekonomi Islam sebagai institusi strategis yang menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan keadilan sosial melalui intervensi negara yang proporsional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas sistem ekonomi secara umum, penelitian ini secara khusus menempatkan peran negara sebagai fokus utama dalam telaah komparatif antara kapitalisme dan sosialisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait posisi negara dalam membangun keseimbangan antara mekanisme pasar, distribusi kesejahteraan, dan keadilan distributif.

Penelitian ini berangkat dari ekonomi Islam menempatkan negara sebagai institusi strategis yang menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan keadilan sosial melalui intervensi yang proporsional, berbeda dengan kapitalisme yang cenderung meminimalkan peran negara dan sosialisme yang menempatkan negara sebagai pengendali utama ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep peran negara dalam sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam serta menjelaskan posisi negara dalam ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang menyeimbangkan mekanisme pasar dan keadilan distributif.

B. Pembahasan

1. Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menempatkan mekanisme pasar sebagai instrumen utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Sistem ini bertumpu pada prinsip kebebasan individu, kepemilikan privat, persaingan pasar, dan minimnya intervensi negara dalam aktivitas ekonomi. Dalam pemikiran kapitalisme klasik, negara dipandang tidak perlu melakukan intervensi secara berlebihan karena mekanisme pasar diyakini mampu menciptakan keseimbangan

ekonomi secara alamiah melalui interaksi antara permintaan dan penawaran (Mariana, Bisri, and Suntana 2023). Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Adam Smith melalui konsep *laissez-faire* dan *invisible hand* yang menekankan bahwa pasar memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan negara yang dominan (Susanti and Yuniati 2025).

Dalam perspektif kapitalisme, peran negara pada dasarnya dibatasi pada fungsi-fungsi tertentu, seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyediakan fasilitas publik yang tidak mampu disediakan oleh sektor swasta (Fuadi 2015). Negara tidak ditempatkan sebagai aktor utama dalam distribusi kekayaan maupun pengendalian aktivitas produksi. Sistem ini memberikan ruang yang luas bagi individu untuk mengembangkan modal, melakukan investasi, dan memperoleh keuntungan melalui mekanisme pasar. Secara ekonomi, kapitalisme dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi produksi karena kompetisi pasar mendorong pelaku ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas barang maupun jasa (Adam, Hamin, and Hasim 2024). Akan tetapi, sistem kapitalisme juga menghadapi berbagai kritik, terutama terkait ketimpangan distribusi kekayaan dan dominasi pemilik modal terhadap sumber-sumber ekonomi. Kebebasan pasar yang terlalu luas sering kali melahirkan monopoli, eksploitasi tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, serta marginalisasi kelompok ekonomi lemah.

Selain itu, minimnya intervensi negara dalam kapitalisme menyebabkan distribusi kesejahteraan sangat bergantung pada kemampuan pasar dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Dalam praktiknya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan secara adil karena adanya ketimpangan kekuatan ekonomi antara pemilik modal dan kelompok masyarakat lemah (Putra et al. 2025). Kondisi tersebut berpotensi menciptakan *asymmetry of power* yang memperbesar kesenjangan sosial dan memperkuat dominasi kelompok ekonomi tertentu terhadap akses sumber daya ekonomi. Dalam perkembangan kapitalisme modern, orientasi ekonomi yang terlalu berpusat pada akumulasi modal juga melahirkan fenomena neoliberalisme dan *financial capitalism* yang memperkuat dominasi

korporasi besar terhadap pasar global. Praktik liberalisasi ekonomi yang tidak diimbangi dengan regulasi negara yang efektif berpotensi melahirkan market failure, monopoli pasar, eksploitasi sumber daya, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai negara (Azizah et al. 2024). Fenomena meningkatnya oligarki ekonomi global dan ketimpangan distribusi kekayaan dalam ekonomi digital kontemporer menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan sosial secara otomatis.

Krisis ekonomi global yang terjadi di berbagai negara juga menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang bekerja tanpa pengawasan negara yang memadai dapat menciptakan instabilitas ekonomi dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks tersebut, negara dalam sistem kapitalisme cenderung bersifat pasif terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat karena orientasi utama sistem ini lebih menekankan efisiensi pasar dan akumulasi modal. Kritik terhadap kapitalisme modern juga diperkuat oleh pemikiran Joseph Stiglitz yang menilai bahwa mekanisme pasar yang tidak diimbangi regulasi negara berpotensi memperbesar ketimpangan sosial dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan demikian, kapitalisme menunjukkan bahwa kebebasan pasar tanpa pengawasan negara yang memadai berpotensi melahirkan ketimpangan sosial dan dominasi ekonomi kelompok tertentu dalam struktur masyarakat.

2. Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Sosialisme

Berbeda dengan kapitalisme, sosialisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengendalikan aktivitas ekonomi. Sistem ini berkembang sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme yang dianggap menciptakan eksploitasi dan ketimpangan sosial akibat dominasi pemilik modal terhadap alat-alat produksi. Dalam sistem sosialisme, negara memiliki kewenangan besar dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi guna menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran sosialisme banyak dipengaruhi oleh Karl Marx yang memandang bahwa kepemilikan privat terhadap alat produksi merupakan penyebab utama ketimpangan sosial dalam masyarakat kapitalis (Dharmawan Nasution et al. 2025). Oleh karena itu, sosialisme menekankan

kepemilikan kolektif dan penguasaan negara terhadap sumber-sumber ekonomi strategis. Negara berfungsi sebagai pengendali utama aktivitas ekonomi sekaligus penjamin distribusi kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem sosialisme memberikan peran yang sangat besar kepada negara dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, distribusi sumber daya, serta pengaturan aktivitas produksi (Gumilang, Aziz, and Wartoyo 2025). Negara ditempatkan sebagai pusat pengambilan kebijakan ekonomi sehingga hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat berada dalam pengawasan dan kontrol negara. Meskipun memiliki orientasi pada pemerataan kesejahteraan, dominasi negara yang terlalu besar dalam sistem sosialisme juga menimbulkan berbagai persoalan. Sentralisasi ekonomi sering kali menyebabkan birokratisasi, rendahnya efisiensi produksi, lemahnya inovasi ekonomi, dan terbatasnya kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dominasi negara dalam seluruh aktivitas ekonomi juga berpotensi menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap negara (*state dependency*) dan mengurangi insentif produktif masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi secara mandiri.

Dalam praktik ekonomi terpusat, negara menjadi aktor dominan dalam menentukan produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan rigiditas ekonomi, lemahnya fleksibilitas pasar, serta inefisiensi dalam perencanaan ekonomi karena seluruh aktivitas ekonomi bergantung pada kebijakan birokrasi negara. Akibatnya, mekanisme ekonomi menjadi kurang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi global. Selain itu, sistem ekonomi yang terlalu terpusat juga berpotensi mengurangi kreativitas dan inovasi masyarakat karena aktivitas ekonomi sangat bergantung pada kebijakan negara. Dengan demikian, sosialisme menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi tanpa keseimbangan kebebasan ekonomi juga berpotensi melahirkan persoalan struktural dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

3. Peran Negara dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memandang hubungan antara negara dan pasar. Sistem ekonomi Islam tidak menempatkan negara sebagai pihak yang pasif sebagaimana dalam kapitalisme dan juga tidak menjadikan negara sebagai pengendali absolut sebagaimana dalam sosialisme. Aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat.

Secara filosofis, ekonomi Islam dibangun atas prinsip tauhid yang memandang bahwa seluruh aktivitas ekonomi pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab moral manusia terhadap Allah dan Masyarakat (Qolbi et al. 2023). Dalam perspektif tersebut, negara tidak hanya berfungsi sebagai institusi politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai institusi moral yang bertanggung jawab menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta (*hifz al-mal*), melindungi kepentingan masyarakat, serta menciptakan stabilitas ekonomi yang berkeadilan. Pemikiran M. Umer Chapra menegaskan bahwa negara dalam ekonomi Islam memiliki fungsi penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, distribusi ekonomi yang adil, dan stabilitas pasar melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kemaslahatan sosial (Febriyanti and Sapa 2025). Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Monzer Kahf yang menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan perlindungan sosial dalam sistem ekonomi Islam (Yeti and Wartoyo 2025).

Intervensi negara dalam ekonomi Islam dilakukan dalam bentuk pengawasan pasar, pengendalian praktik monopoli, distribusi kekayaan, pengelolaan zakat, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah. Konsep hisbah dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengawasi aktivitas pasar agar berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga

stabilitas harga dan mencegah praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif. Konsep intervensi yang proporsional dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa negara tidak mengambil alih seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi hadir ketika terjadi distorsi pasar, ketimpangan distribusi kekayaan, monopoli, penimbunan barang, maupun praktik ekonomi yang merugikan kepentingan public (Hakim 2017). Dengan demikian, intervensi negara dalam ekonomi Islam bersifat selektif dan berbasis pada prinsip kemaslahatan, bukan dominasi negara terhadap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat.

Intervensi proporsional tersebut diwujudkan melalui beberapa mekanisme, seperti pengawasan pasar melalui hisbah, pengendalian praktik monopoli dan penimbunan barang, pengelolaan zakat dan instrumen sosial, perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah, serta kebijakan distribusi kekayaan untuk menjaga keseimbangan sosial (Huda 2019). Dalam konteks ini, negara tidak menggantikan mekanisme pasar, tetapi memastikan pasar berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik. Berbeda dengan kapitalisme yang memberikan kebebasan penuh kepada pasar dan sosialisme yang menempatkan negara sebagai pengendali utama ekonomi, ekonomi Islam menempatkan negara sebagai regulator yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam sistem ini, mekanisme pasar tetap diakui sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi, namun negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi ketika terjadi distorsi pasar, ketimpangan distribusi kekayaan, maupun praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, peran negara dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasar, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab menciptakan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menempatkan negara sebagai institusi yang menjaga harmoni antara efisiensi ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah.

4. Telaah Komparatif Kapitalisme, Sosialisme, dan Ekonomi Islam

Kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dalam memandang posisi negara dalam aktivitas ekonomi. Kapitalisme menekankan kebebasan pasar dan membatasi intervensi negara seminimal mungkin. Sistem ini memberikan ruang yang luas bagi individu dalam mengembangkan modal dan melakukan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, minimnya intervensi negara dalam kapitalisme berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan dan dominasi pemilik modal terhadap kelompok ekonomi lemah. Sebaliknya, sosialisme menempatkan negara sebagai pusat pengendalian ekonomi dengan tujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewenangan besar dalam mengatur distribusi sumber daya dan aktivitas produksi. Meskipun sosialisme berorientasi pada pemerataan ekonomi, dominasi negara yang terlalu besar berpotensi menghambat kebebasan ekonomi dan efisiensi pasar.

Sementara itu, ekonomi Islam menempatkan negara pada posisi yang moderat dengan mengintegrasikan kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial secara seimbang. Negara dalam ekonomi Islam tidak bersifat pasif sebagaimana dalam kapitalisme dan tidak pula bersifat dominatif sebagaimana dalam sosialisme. Intervensi negara dilakukan secara proporsional untuk menjaga stabilitas pasar, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang berupaya membangun keseimbangan antara mekanisme pasar dan keadilan sosial. Sistem ini tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan distribusi kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sistem ini mengakui hak kepemilikan individu dan kebebasan ekonomi, namun tetap menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menciptakan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dalam memandang hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat dibandingkan kapitalisme dan sosialisme.

5. Ekonomi Islam sebagai Sistem Keseimbangan

Ekonomi Islam pada dasarnya menempatkan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan tersebut tercermin dalam hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara kebebasan ekonomi dan intervensi negara, serta antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat (El Hasanah, Dassucik, and Farida 2025). Dalam perspektif ini, negara memiliki fungsi strategis dalam menjaga harmoni ekonomi agar aktivitas pasar tetap berjalan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Konsep keseimbangan dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa negara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap distribusi kesejahteraan dan perlindungan kelompok masyarakat lemah. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi ketika terjadi distorsi pasar, monopoli, penimbunan barang, maupun praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

Melalui instrumen zakat, hisbah, distribusi kekayaan, pengawasan pasar, serta larangan praktik monopoli dan riba, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial (Karimullah 2025). Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa negara dalam ekonomi Islam memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan distribusi kesejahteraan berjalan secara lebih merata. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan konsep peran negara yang lebih moderat dan proporsional dibandingkan kapitalisme maupun sosialisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa ekonomi Islam memposisikan negara sebagai institusi strategis yang menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan keadilan sosial melalui intervensi yang proporsional. Posisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan paradigma ekonomi yang tidak hanya menempatkan negara sebagai regulator pasar, tetapi juga sebagai institusi moral dan sosial yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara

efisiensi ekonomi dan keadilan distributif. Dalam perspektif ini, negara berfungsi memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan ketimpangan sosial yang merugikan masyarakat. Relevansi konsep tersebut semakin penting dalam konteks ekonomi modern yang ditandai oleh meningkatnya ketimpangan global, dominasi korporasi multinasional, dan berkembangnya ekonomi digital yang berpotensi memperbesar kesenjangan ekonomi masyarakat.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam terletak pada posisi negara dalam mengatur aktivitas ekonomi dan distribusi kesejahteraan. Kapitalisme menempatkan negara secara minimal dalam mekanisme pasar sehingga mendorong efisiensi ekonomi, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Sebaliknya, sosialisme menempatkan negara sebagai pengendali utama ekonomi untuk mencapai pemerataan kesejahteraan, tetapi berisiko membatasi kebebasan ekonomi dan inovasi.

Penelitian ini menemukan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang melalui konsep intervensi negara yang proporsional. Negara berperan menjaga stabilitas pasar, mencegah ketidakadilan ekonomi, melindungi kelompok rentan, serta menjamin distribusi kesejahteraan tanpa menghilangkan kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam menghadirkan jalan tengah antara dominasi pasar dalam kapitalisme dan dominasi negara dalam sosialisme, dengan menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sebagai prinsip utama pembangunan ekonomi.

Pemerintah dan para pengambil kebijakan disarankan untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan distributif dan perlindungan sosial sebagaimana prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasi peran negara dalam ekonomi Islam secara

empiris guna memperkuat relevansi dan aplikasinya dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer.

D. Daftar Pustaka

- Adam, Moh. Nasrul Arief Setiawan, Dewi Indrayani Hamin, And Hasim Hasim. 2024. "Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme Dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi Dan Dampak Sosial." *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 7 (2): 1011–24.
- Aulia, Dewi Nurul. 2024. "Dinamika Pemikiran Ekonomi : Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Abad Klasik Pertengahan Dan Kontemporer." *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Scientific Studies (Ijomss)* 2 (1): 72–83. <https://doi.org/10.33151/Ijomss.V2i1.129>.
- Azizah, Wafik, Binar Nan Baik, Muhammad Reza Fahlefi, And Sarpini Sarpini. 2024. "Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak Dan Implikasinya Dalam Konteks Ekonomi Global." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1 (4): 251–65. <https://doi.org/10.61722/Jaem.V1i4.3333>.
- Batubara, Maryam, And Febriyani Natari Manik. 2023. "Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2): 6080–90.
- Dewi, Riza Sofiana, Sova Sevilia, And Kotimah Kotimah. 2026. "Analisis Kebijakan Subsidi Pemerintah Dalam Perspektif Mikro Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Eksya : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 3 (2): 26–46.
- Dharmawan Nasution, Kautsar Fatin, Audina Pratiwi, Feny Fadiya, Nadya Nafisha, Rut Afentina Sinambela, And Lucky Satria Pratama. 2025. "Kritik Marxisme Terhadap Kapitalisme : Tinjauan Literatur Tentang Eksploitasi Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11 (8): 123–33.
- Febriyanti, Rachma, And Nasrullah Bin Sapa. 2025. "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya." *Jse: Jurnal Sharia Economica* 4 (2): 63–75. <https://doi.org/10.46773/Jse.V4i2.1883>.
- Fuadi, Ariza. 2015. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islma Dan Kapitalisme." *Jesi: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 5 (1): 14–32. [https://doi.org/10.21927/Jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/Jesi.2015.5(1).13-32).
- Gumilang, Agung, Abdul Aziz, And Wartoyo Wartoyo. 2025. "Sistem Kapitalisme Dan Sosialisme : Sebuah Tinjauan Dan Kritik Ekonomi Islam." *Multiplier (Jurnal Magister Manajemen)* 6 (1): 30–51. <https://doi.org/10.24905/Mlt.V6i1.82>.
- Gunawan, M. Indra. 2020. "Sistem Ekonomi Islam Sebagai Solusi Problematika

- Sistem Kapitalisme Dan Sistem Sosialisme.” *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4 (2): 214–31. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.138>.
- Hakim, Lukmanul. 2017. “Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Ekomadania : Journal Of Islamic Economic And Social* 1 (1): 1–15.
- Hasanah, Lak Iak El, Dassucik Dassucik, And Ida Farida. 2025. *Pengantar Ekonomi Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang*. Edited By Tahta Media. Pertama. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Huda, Miftakhul. 2019. “Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal El-Faqih* 5 (2): 62–82. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.66>.
- Indonesia, Oxfam In. 2023. “Empowering Women’s Leadership For A Sustainable Change In Indonesia.” Jakarta.
- Juhariyah, Juhariyah. 2025. “Resiliensi Finansial Di Tengah Turbulensi Global : Eksplorasi Model Ekonomi Syariah Sebagai Solusi.” *Jse: Jurnal Shariah Economica* 4 (4): 321–38. <https://doi.org/10.46773/C0xfw304>.
- Juliyanto, Muhammad Satrio, Rafi Alkaf Asy Syafi, Muh Fatkhurrozi, Muhammad Taufiq Abadi, And Muhammad Aris Syafi’i. 2024. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik, Kapitalisme, Sosialisme, Dan Keynesian.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1 (3): 368–76. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.610>.
- Karimullah, Suud Sarim. 2025. “Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif.” *Jurnal Hei Ema* 4 (1): 133–52. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>.
- Khoiry, Kevin Akbar, Muhammad Andra Satria Hafiz, And Nur Rahmad Ariansyah. 2023. “Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional : Kelebihan Dan Kekurangan.” *Journal Islamic Education* 1 (3): 446–56.
- Mariana, Rani, Hasan Bisri, And Ija Suntana. 2023. “Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies* 6 (4): 43–54. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.753>.
- Narjono, Arijo Isnoer. 2025. “Membedah Relevansi Pasal 33 Uud 1945 Dalam Sistem Ekonomi Modern: Suatu Studi Literatur.” *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7 (2): 160–75. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i2.4773>.
- Nissa, Riema Ainun, Dwi Ayu Septiyani, Muthia Husna Qolby, Ibrahim Abdu Salam, Muhammad Taufiq Abadi, And Muhammad Aris Syafi’i. 2024. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Merkantil dan Ekonomi Klasik Adam Smith.” *Kampus Akademik Publishing* 1 (3): 361–67.

<https://doi.org/10.61722/Jirs.V1i3.608>.

- Putra, Satria Manggala, Muhammad Rizki Ramadhan, Gisca Amalia Putri, Muhammad Iqbal Purwanto, And Farahdinny Siswajhanty. 2025. "Kapitalisme Dan Hukum : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (6): 8651–57. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i6.2581>.
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, And Happy Sista Devy. 2023. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya* 2 (1): 19–30.
- Royani, Royani, Yadi Janwari, And Ahmad Hasan Ridwan. 2023. "Comparison Of Conventional Economic Theory With Islamic Economic Thought." *Journal For Islamic Studies* 6 (3): 431–53. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i3.720>.
- Rusmiyati, Kurnia, Abu Syhabudin, Anggi Prayitno, And Dea Puspita Sari. 2025. "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 8 (2): 301–7. <https://doi.org/10.31949/Maro.V8i2.17515>.
- Sulaiman, Sofyan, And Ameilia Bella Putri. 2026. "Sejarah Pemikiran Ekonomi: Transisi Peradaban Kapitalisme, Sosialisme, Dan Islam." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Etika, Dan Ilmu Sejarah (Jebesh)* 4 (9): 52–66.
- Susanti, Komang Dewi, And Ketut Yuniati. 2025. "Analisis Komparatif Kebijakan Keuangan Pasar Dan Mekanisme Pasar (Kajian Arthasastra Dan Teori Adam Smith)." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 3 (1): 23–33.
- Yetti, Febri Delmi, And Wartoyo Wartoyo. 2025. "Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-Iimj): Paradigma Baru Pasar Berkeadilan Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan* 6 (5): 2312–24. <https://doi.org/10.38035/Jafm.V6i5.2574>.